

ABSTRAK

Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena pada hakikatnya semua manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya kematian diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian mengenai pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban ini sebenarnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun realitanya seringkali hal ini menimbulkan masalah yang berujung pada pengadilan. Ketidaktahuan pihak yang dirugikan mengenai hukum menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh haknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah yang dapat dilakukan ahli waris terkait harta warisan yang dikuasai ahli waris pengganti dan bagaimana pembagiannya harta warisan yang masih dikuasai ahli waris pengganti.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara narasumber yaitu hakim dan panitera muda di beberapa Pengadilan Negeri, sedangkan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis.

Dalam menghadapi kasus semacam ini maka pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan secara kekeluargaan, ketika telah diupayakan namun gagal, ahli waris yang berhak bisa meminta bantuan pengadilan. Mengenai siapa yang berhak dibuktikan dengan surat keterangan waris yang dikeluarkan notaris, karena pada kasus ini para pihak merupakan Golongan Timur Asing Tionghoa yang tunduk pada KUH Perdata. Dikeluarkannya surat keterangan waris tersebut yaitu setelah notaris melakukan pengecekan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, apakah pewaris selama hidupnya pernah meninggalkan testamen atau tidak. Pembagian jumlah bagiannya dalam kasus ini berpedoman pada KUH Perdata, karena ahli waris merupakan golongan I dan terjadi pergantian tempat golongan 1 pula maka hak bagiannya kepala demi kepala adalah sama. Dalam pelaksanaannya apabila pihak yang menguasai tetap tidak mau membagi harta warisan maka Balai Harta Peninggalan akan membantu untuk melakukan pembagiannya misalnya dengan melakukan penjualan secara lelang, namun sebaliknya jika dengan sukarela membagi harta warisan maka apakah objek waris akan dijual lebih dulu atau dibagi langsung tergantung kesepakatan para pihak.

Kata Kunci: Hukum Waris, Harta Warisan, Ahli Waris

ABSTRACT

Inheritance law is closely related to the scope of human life because in essence all humans will surely experience legal events in the form of death. The legal consequences caused by the occurrence of death include how to manage and continue the rights and obligations of someone who died. Settlement of the management and continuation of these rights and obligations can actually be resolved by deliberation and family, but in reality this often creates problems that lead to court. The loss of ignorance of the parties regarding the law causes them to be unable to obtain their rights. The purpose of this study is to find out how the heirs can do related to inheritance controlled by substitute heirs and how the inheritance is shared by the substitute heirs.

The approach method used in this study is normative juridical which is supplemented by interviewing informants namely judges and young clerks in several District Courts, while the research specifications use analytical descriptive.

In dealing with this kind of case, the first thing to do is to settle in a family manner, when it has been tried but failed, the rightful heirs can request court assistance. Regarding who is entitled to be proven by a certificate of inheritance issued by a notary, because in this case the parties are Chinese Foreign Eastern Groups who are subject to the Civil Code. The issuance of the certificate of inheritance is after the notary checks to the General Directorate of General Law Administration, whether the heir during his life has left the testament or not. The division of the number of parts in this case is guided by the Civil Code, because the heirs are class I and there is a change in place of group I also, the right of the part head by head is the same. In its implementation, if the controlling party still does not want to share the inheritance, the Heritage Office will help to do the distribution, for example by making an auction sale, but on the other hand if voluntarily dividing the inheritance, the object of the inheritance will be sold first or divided directly depending on the agreement of the parties.

Keywords: Law of Inheritance, Inheritance, Heir